BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang KKL

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan berbagai jenis masalah. Masalah utama yang dihadapi di Indonesia adalah dibidang kependudukan yang masih tingginya pertumbuhan penduduk. Keadaan penduduk yang demikian telah mempersulit usaha peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk semakin besar usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu Pemerintah terus berupaya untuk menekan laju pertumbuhan dengan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Keberhasilan kegiatan pendidikan dan pelatihan dinilai dari efektivitas dan efisiensi yang diukur dari segi masukan, proses maupun hasil suatu kegiatan Diklat. Masukan yang dilihat meliputi Kurikulum dan bahan ajar lainnya, sedangkan proses menyangkut proses belajar mengajar dengan berbagai media yang digunakan, yang akhirnya diharapkan dapat mencapai tujuan pelaksanaan suatu pelatihan. Penilaian pendidikan pelatihan bukan hanya sebelum dan selama pelatihan, tetapi juga sesudah pelatihan dengan kegiatan evaluasi pasca pelatihan. yang dilaksanakan setelah tamatan pelatihan bekerja kembali dan mempraktekkan hasil pelatihan dilapangan.

Efektivitas kinerja perseorangan atau pegawai dalam istilah administrasi pemerintahan disebut aparatur determinasi pengawasan pimpinan, etos kerja pegawai bersangkutan dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam administrasi pemerintahan salah satu bentuk pengawasan yang dikenal adalah pengawasan melekat.

Program KKB adalah salah satu program dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program ini salah satu tujuannya adalah penjaringan kehamilan menggunakan metode kontrasepsi dan menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat melalui usaha-usaha perencanaan dan penjaringan penduduk.

Program kependudukan dan KB merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia (SDM). Peningkatan kualitas SDM ini salah satunya dapat dilakukan melalui program peningkatan kapasitas dan keterampilan para pengelola program kependudukan dan KB, termasuk di dalamnya TPD/TPK se Jawa Barat.

Pertumbuhan dan kemampuan mengembangkan sumber daya alam laksana deret hitung, sedangkan pertumbuhan dan perkembangan manusia laksana deret ukur, sehingga pada suatu titik sumber daya alam tidak mampu menampung pertumbuhan manusia yang sangat cepat sekali. Diharapkan setiap keluarga memperhatikan dan merencanakan jumlah keluarga yang diinginkan berkenaan dengan hal tersebut. Paradigma baru program KKB nasional telah diubah visinya dari mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) menjadi "Keluarga Berkualitas 2015" untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas adalah keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pembangunan Kependudukan dan Keluarga berencana merupakan salah satu program sosial dasar yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kualitas penduduk dan sekaligus berkontribusi terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk. Untuk melaksanakan program tersebut telah mendapat dukungan yang kuat dengan adanya komitmen nasional yaitu telah dilembagakannya program KKB nasional melalui undang-undang no 10/2010 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Dengan disahkannya undang-undang

tersebut bangsa Indonesia telah mempunyai komitmen resmi untuk membangun keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan KB dan perluasan jangkauan dengan mendorong pasangan usia subur memakai metoda kontrasepsi jangka panjang di Provinsi Jawa Barat. Penggarapan KB di wilayah Jawa Barat sifatnya wajib karena memberikan keadilan bagi warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang sama dengan masyarakat di wilayah lainnya.

Kegiatan program KKB di wilayah Jawa Barat memerlukan dukungan berbagai pihak. Oleh karenanya, BKKBN selalu bermitra dengan menggandeng berbagai elemen baik dari kalangan pemerintah, swasta, LSOM, organisasi profesi, akademis, tokoh masyarakat, tokoh agama yang mempunyai komitmen tinggi terhadap program KKB. Ini dimaksudkan dalam upaya meningkatkan cakupan pelayanan.

Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga Penggerak Desa dan Tenaga Penggerak Kelurahan di BKKBN Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut TPD dan TPK bertujuan untuk memberikan pengarahan agar program KKB bisa berjalan dengan baik dan lancar di lapangan dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.

Menurut penjelasan di atas, maka dapat dilihat ada berbagai macam masalah, diantaranya sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk yang besar merupakan masalah karena tidak meratanya pembangunan, pembangunan hanya terpusat di kota-kota besar, sedangkan di desa tidak ada pembangunan fisik.
2. Permasalahan di Jawa Barat dihadapkan dengan permasalahan kemiskinan, kematian ibu dan anak yang masih tinggi.
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia dihadapkan pada permasalahan yang selalu menghantui bangsa Indonesia, yaitu pemanasan global, laju pertumbuhan penduduk dan kebuntuan politik yang menghalangi kerjasama global untuk mengatasi masalah tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik membuat laporan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) mengenai efektivitas

pendidikan dan pelatihan, maka penulis mengambil judul **"EFEKTVITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (KKB) BAGI TENAGA PENGGERAK DESA ATAU KELURAHAN (TPD/TPK) DI BIDANG PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) PROVINSI JAWA BARAT".**

1.2 Kegunaan KKL

Adapun kegunaan penulisan ini ditijau dari sudut pendekatan keilmuan sebagai berikut :

1. Bagi kepentingan Penulis

   Untuk lebih mengembangkan dan memahami Ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Pemerintahan yang meliputi efektivitas pendidikan dan pelatihan program KKB bagi TPD/TPK di Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat.

2. Bagi kegunaan teoritis

   Hasil Laporan KKL ini diharapkan dapat memberikan upaya peningkatan kinerja pegawai BKKBN Provinsi Jawa Barat.

3. Kegunaan Praktis

   Laporan KKL ini diharapakan memberikan manfaat bagi BKKBN di Provinsi Jawa Barat sebagai suatu bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja pegawai BKKBN Provinsi Jawa Barat.

1.3 Metode KKL

Metode yang digunakan di dalam laporan KKL ini adalah metode deskriptif dengan meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskipsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dan teknik pengumpulan datanya adalah sebagai berikut :

1. Studi pustaka

   peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

2. Observasi

   Dalam metode observasi ini mengandung aspek-aspek antara lain : program yang ada, administrasi yang dapat dilihat, perlengkapan, observasi lingkungan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, dan pelaksanaan di lapangan.

1.4 Lokasi dan Waktu KKL

1.4.1 Lokasi KKL

Pelaksanaan kerja praktek akan di lakukan di salah satu Instansi Pemerintahan yaitu Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang beralamat di Jln. Sederhana No. 1 Bandung, dengan no telepon (022) 2033117, E-mail : Bkkbn_provjabar@yahoo.com dan Website www.bkkbnprovjabar.go.id

1.4.1.1 Gambaran Umum Lokasi KKL

Berdasarkan Peraturan 62 tahun Presiden Nomor 2010, tugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, salah satu fungsi yang diselenggarakan BKKBN adalah pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Deputi

Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan (Latbang) sebagai unsur pelaksana sebagain tugas dan fungsi tersebut.

Tugas Deputi Bidang Latbang di area pelatihan adalah perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pemberian bimbingan dan fasilitasi di bidang pendidikan dan pelatihan (Diklat) pengendalian penduduk, KB, KR serta KS dan PK. Unit eselon II di tingkat Pusat yang melaksanakan tugas penyelenggaraan Diklat di tingkat nasional adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Pulap). Tugas Pulap adalah menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana dan fungsinya adalah penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan Diklat, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pemberiaan bimbingan teknis dan fasilitasi dan pelaksanaan urusan tata usaha di bidang Diklat serta pelaksanaan tugas lain dari Deputi bidang Latbang.

Pada tingkat unit pelaksana Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, fungsi penyelenggaraan Diklat di bidang pengendalian penduduk, KB, KR, KS dan PK dilaksanakan oleh Bidang Pelatihan dan Pengembangan (tipe A) dan atau Bidang Advokasi, Penggerakkan, Informasi dan Pelatihan (tipe B). Fungsi yang dilakukan adalah pemberian fasilitasi dan pelaksanaan, pemberiaan bimbingan teknis dan fasilitasi, pelaksanaan urusan tata operasional dan pemantauan serta evaluasi di bidang Diklat. Sedangkan untuk fungsi di bidang tipe B adalah penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang Diklat.

Selanjutnya, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB memiliki unit pelaksana Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di berupa Balai Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana (Balai Diklat KKB). Tugas Balai Diklat KKB adalah melaksanakan Diklat teknis, fungsional, manajemen di bidang bidang pengendalian penduduk, KB, KR, KS dan PK. Fungsinya adalah penyusunan rencana program dan kerjasama, pelaksanaan Diklat,

penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, kearsipan dan kerumahtanggaan serta sarana dan prasarana Diklat dan hubungan masyarakat. Terdapat delapan Balai Diklat KKB yang tersebar di Pulau Jawa, yaitu : Balai Diklat KKB Bogor, Balai Diklat KKB Cirebon, Balai Diklat KKB Garut, Balai Diklat KKB Banyumas, Balai Diklat KKB Pati, Balai Diklat KKB Ambarawa, Balai Diklat KKB Malang, dan Balai Diklat KKB Jember.

1.4.1.2 Visi dan Misi BKKBN Provinsi Jawa Barat

Secara organisator Bidang Pelatihan dan Pengembangan merupakan bagian tak terpisahkan dari struktur organisasi BKKBN. Eksistensi serta tugas dan fungsinya harus mendukung tujuan BKKBN sebagai organisasi induknya. Dengan demikian visi dan misi bidang pelatihan dan pengembangan haruslah mendukung visi BKKBN yaitu mewujudkan “Keluarga Berkualitas 2015”, keluarga-keluarga Indonesia yang “maju, mandiri, sejahtera, dan berketahanan”. Guna menunjang keberhasilan visi dimaksud, maka pelatihan dan pengembangan (Latbang) mempunyai visi Latbang yang profesional. Visi tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan kegiatan pelatihan dan pengembangan yang profesional, sehingga kinerja program KB Nasional semakin baik dan visi keluarga berkualitas tahun 2015 dapat terwujud.

Pengelolaan kegiatan yang profesional adalah pengelolaan kegiatan yang didasarkan pada kompetensi standar (didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang handal) dan didukung oleh semangat belajar dan komitmen moral yang kuat untuk menghasilkan kinerja yang baik dan sempurna. Potensi tersebut akan semakin mantap apabila didukung oleh manajemen dan teknologi, sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

Selain itu, jargon BKKBN “Dua anak lebih baik”, bukan hanya menjadi jargon program KB semata, tetapi memiliki makna filosofi “kesejahteraan” yang sangat mendalam. Dengan Dua anak diyakini bahwa setiap keluarga dapat lebih mudah memecahkan persoalan pendidikan dan

kesehatan yang makin mahal serta persoalan nilai daya beli masyarakat yang semakin rendah, yang lebih penting setiap orang tua dapat memberikan perhatian dan bimbingan yang lebih terhadap anak-anaknya, sehingga kualitas, akhlak dan moralitas anak dapat lebih dipertanggungjawabkan.

Penduduk sering diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Penduduk yang besar dan berkualitas akan menjadi aset yang bermanfaat bagi pembangunan, sebaliknya penduduk yang besar tapi rendah kualitasnya akan menjadi beban yang berat.

Pertambahan penduduk disebabkan oleh meningkatnya angka kelahiran dan menurunnya angka kematian. Memiliki keturunan adalah bagian tidak terpisahkan dari eksistensi manusia. Namun, memiliki keturunan dalam jumlah tidak terkendali, dapat menjadi ancaman terbesar bagi kelangsungan eksistensi itu sendiri.

Untuk mendukung terwujudnya visi program KKB Nasional, misi bidang pelatihan dan pengembangan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan SDM pengelola dan pelaksana program KKB nasional yang berkualitas melalui penyelenggaraan pelatihan tenaga pengelola dan pelaksana program KB Nasional secara profesional.
2. Mewujudkan institusi Balatbang dan Badan Diklat yang profesional, melalui pengembangan manajemen, sarana dan prasarananya.
3. Mewujudkan SDM pengelola dan pelaksana program KKB nasional yang berkualitas melalui penyelenggaraan pelatihan luar negeri jangka panjang dan jangka pendek, seminar dan workshop ilmiah, serta *Observation Study Tour* dalam rangka kerja sama internasional.
4. Melakukan kerjasama internasional, khususnya dalam rangka kerjasama di bidang kependudukan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
5. Menyediakan data, fakta informasi maupun rekomendasi kebijakan hasil penelitian tentang KB dan kesehatan reproduksi secara cepat, akurat, relevan untuk pengembangan dan kemajuan program nasional KB dan kesehatan reproduksi.

6. Menyediakan model-model operasional sesuai dengan kebutuhan lapangan yang dirancang berdasarkan kegiatan *"operational research".*
7. Mewujudkan SDM pengelola dan pelaksana program KB Nasional yang berwawasan gender melalui penyelenggaraan pelatihan dalam rangka meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender.
8. Menyediakan data, informasi maupun rekomendasi kebijakan hasil penelitian tentang keluarga sejahtera dan gender secara cepat, akurat dan relevan untuk pengembangan dan kemajuan program keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas perempuan.

Di era otonomi daerah ini, tidak seluruh kewenangan diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Diantara kewenangan yang masih akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat (sentralisasi) adalah kewenangan bidang pelatihan dan pengembangan dengan fokus pada kegiatan pembangunan sumber daya manusia *(Capacity Building)* dan penyediaan data dan informasi yang akurat dan terkini. Untuk dapat melaksanakan misi tersebut perlu penyempurnaan dan mengembangkan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sehingga Visi Latbang untuk menjadi "Latbang Profesional" dapat terwujud.

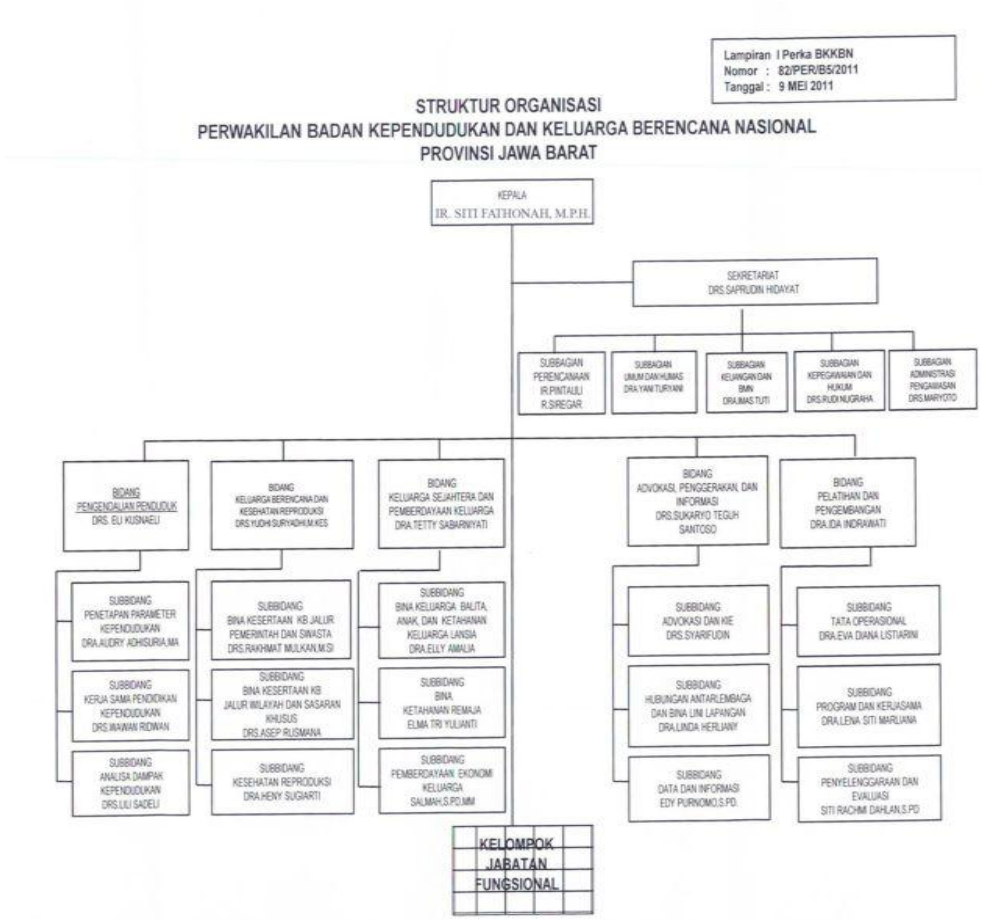
Pengelolaan Bidang Latbang yang profesional yang akan dibahas lebih lanjut difokuskan kepada tiga elemen penting yaitu : Pengelolaan Institusi Diklat maupun Litbang (aspek manajemen dan kepemimpinan), Pengembangan program yang berorientasi kepada kebutuhan pasar serta penyelenggaraan kegiatan diklat maupun litbang.

Filosofi BKKBN adalah Menggerakkan Peran Serta Masyarakat Dalam Keluarga Berencana, sedangkan grand strateginya adalah Menggerakkan dan Memberdayakan Seluruh Masyarakat dalam Program KB, Menata Kembali Pengelolaan Program KB, Memperkuat SDM Operasional Program KB, Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui Pelayanan KB dan Meningkatkan Pembiayaan Program KB.

1.4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi diperlukan dalam memberikan kemudahan dan memberikan kejelasan dalam bentuk kerangka mengenai gambaran berbagai hubungan kerja antara aparatur Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat serta menentukan dan tanggung jawab jabatan masing-masing anggota dalam suatu wadah organisasi. Berikut struktur organisasi dilingkungan BKKBN Provinsi Jawa Barat

Gambar 1.1
Struktur Organisasi BKKBN Provinsi Jawa Barat



1.4.1.4 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

1. Tugas Pokok

   Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi

   Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat, mempunyai fungsi :

   a. Pelaksanaan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
   b. Penyelenggaraan koordinasi dalam rangka penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah dibidang pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
   c. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
   d. Penyelenggaraan pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   e. Penyelenggaraan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   f. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
   g. Penyelenggaraan pelayanan administrasi dan ketatatusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   h. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
   i. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKKBN.

j. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasta, LSOM dan masyarakat dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

k. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

3. Kewenangan

Sebagaimana diatur oleh Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, maka Kewenangan Wajib BKKBN adalah sebagai berikut :

a. Program Keluarga Berencana.
b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja.
c. Program Pelayanan Kontrasepsi.
d. Program Pembinaan peran serta masyarakat Pelayanan KB KR/KS-PK.
e. Program Penyiapan tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.
f. Program Promosi kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat.
g. Program pengembangan Pusat pelayanan Informasi dan konseling KRR.
h. Program peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HI/AIDS.
i. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
j. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina keluarga Balita.
k. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU.
l. Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas.

1.4.2 Waktu KKL

Waktu yang di butuhkan oleh Mahasiswa untuk melaksanakan KKL (tahap Sosialisasi, bimbingan, penyetujuan dan pengumpulan KKL) yaitu di mulai sejak 02 Mei 2012 dan di rencanakan selesai pada saat pelaksanaan UAS semester ganjil 2012/2013. Berikut adalah tabel jadwal KKL :

Tabel 1.1
Jadwal KKL

Kegiatan	Tahun 2012						
	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov
Penyusunan rancangan judul							
Penyusunan Usulan Penelitian							
Pengumpulan Data							
Penyusunan Laporan KKL							
Pengumpulan Laporan KKL							